



KEBIJAKAN BAHASA TERHADAP PERAN BAHASA ASING DI INDONESIA: PERSPEKTIF EKOLOGI BAHASA

Lanny Isabela Dwisyahri Koroh

FKIP Universitas Citra Bangsa

Surel: lannykoroh1717@gmail.com

ABSTRACT

Foreign languages have a certain role in the context of the life of languages in Indonesia. This function is realized in its use in certain domains, both natural and artificial based on language policy. In the Indonesian context, foreign languages, especially English, have an important role as a means of international communication. Ecologically, linguistic diversity in Indonesia requires a separation of functions and roles between local languages, Indonesian and foreign languages. In the context of language ecology, foreign languages have the potential to dominate Indonesian and local languages. Regarding Indonesian, hegemony occurs because foreign languages tend to have more economic value than Indonesian. Meanwhile, regarding local languages, foreign language hegemony is caused by low interdependence with local languages in terms of structure and lexicon. In terms of language policy and language ecology, there are prescriptive matters that must be adhered to, but there are also descriptive matters related to the function and role of foreign languages that need attention. Thus, foreign languages will remain important in the context of global communication.

Key words: *language function, language ecology, language policy.*

ABSTRAK

Bahasa asing mempunyai peranan tertentu dalam konteks kehidupan bahasa di Indonesia. Fungsi ini diwujudkan dalam penggunaannya pada ranah tertentu, baik alami maupun buatan berdasarkan kebijakan bahasa. Dalam konteks Indonesia, bahasa asing khususnya bahasa Inggris mempunyai peranan penting sebagai alat komunikasi internasional. Secara ekologis, keberagaman bahasa di Indonesia memerlukan adanya pemisahan fungsi dan peran antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Dalam konteks ekologi bahasa, bahasa asing berpotensi mendominasi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Terkait bahasa Indonesia, hegemoni terjadi karena bahasa asing cenderung memiliki nilai ekonomi lebih dibandingkan bahasa Indonesia. Sedangkan terkait bahasa daerah, hegemoni bahasa asing disebabkan oleh rendahnya saling ketergantungan dengan bahasa daerah dari segi struktur dan leksikon. Dari segi kebijakan bahasa dan ekologi bahasa, ada hal-hal yang bersifat preskriptif yang harus dipatuhi, namun ada pula hal-hal deskriptif terkait fungsi dan peranan bahasa asing yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian, bahasa asing akan tetap penting dalam konteks komunikasi global.

Kata kunci: *fungsi bahasa, ekologi bahasa, kebijakan bahasa.*

1.PENDAHULUAN

Setiap bahasa hidup dalam suatu komunitas yang disebut sebagai masyarakat tutur/guyup tutur (*speech community*). Mati hidup bahasa ditentukan oleh sikap penuturnya yang antara lain terwujud melalui kekerapan pemakaian oleh penuturnya. Jika demikian, dapat saja



dikatakan bahwa sikap negatif yang berimplikasi pada menurunnya kekerapan pemakaian suatu bahasa merupakan indikasi kuat bagi pergeseran fungsi dan kedudukan suatu bahasa.

Dari perspektif yang lain, faktor hegemoni bahasa dapat pula menjadi pemicu pergeseran bahasa. Faktor hegemoni ini disebabkan oleh faktor fungsi ekonomis bahasa tertentu. Bahasa yang berfungsi ekonomis tinggi, dalam hal ini sebagai pesyaratan rekrutmen untuk pekerjaan-pekerjaan yang bergengsi, sangat mendominasi ruang pembelajaran pada pendidikan formal maupun kursus-kursus.

Ekologi bahasa merupakan kondisi alamiah yang memerlukan sentuhan kebijakan agar fungsi dan kedudukan bahasa (-bahasa) tertata secara baik. Sentuhan kebijakan ini belakangan ini menjadi sangat penting setelah timbul sejumlah kesadaran baru, antara lain: (1) tidak ada bahasa yang tidak penting bagi penuturnya; (2) bahasa ibu yang dikuasai melalui pemerolehan/ akuisisi tetap penting sepanjang hayat karena melalui bahasa inilah manusia menyadari hakikat kemanusiaannya.

Ekologi, kebijakan dan peran bahasa secara konseptual berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini secara lebih operasional jika diletakkan pada subjek bahasa tertentu, akan lahir sejumlah proposisi yang secara empirik dapat menjadi dasar argument untuk mempertahankan suatu bahasa. Hal inilah yang menjadi alasan pokok dimunculkannya topik mengenai peran bahasa Inggris dari perpektif ekologi bahasa dan kebijakan bahasa.

2. KONSEP

2.1 Ekologi Bahasa

Gould (1993) mengidentifikasi ekologi sebagai permainan dadu yang memperlihatkan persaingan individu dalam suatu spesies, dan antara spesies di dalam habitat yang sama. Istilah ekologi dalam hubungan dengan bahasa mulanya diperkenalkan oleh Carl Voegelins dan Nowl W. Schutz, Jr. dalam tulisan berjudul *Language Situation in Arizona* (1967). Voegelin telah memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ekologi bahasa, dan memelopori penggunaan istilah yang berkaitan dengan hubungan internal yang kompleks antara bahasa di Barat Daya Amerika dengan menyoroti masyarakat dwibahasa. Meskipun demikian, ekologi bahasa sebagai sebuah paradigma baru dimunculkan oleh Einar Ingvald Haugen pada era 1980-an. Professor di University of Wisconsin-Madison dan Harvard University mengidentifikasi adanya interaksi antara bahasa dan lingkungannya (Fill & Muhlhausler, 2001:43) dengan menggunakan metafora yang membandingkan hubungan



ekologis antara sekelompok spesies binatang dan tumbuhan tertentu dalam dan dengan lingkungan tertentu.

Haugen mendefinisikan ekologi bahasa sebagai ilmu tentang interaksi antara suatu bahasa tertentu dengan lingkungan tempat bahasa itu dituturkan (Fill & Muhlhausler, 2002:57, Dil, 1972:325-326). Menurutnya, lingkungan merupakan domain pemikiran seseorang terhadap suatu dunia yang dirujuk (*referent*) melalui kosa kata yang disiapkan dalam penggunaan bahasa. Lingkungan yang paling nyata dari sebuah bahasa adalah komunitas/ guyup tutur yang menggunakan bahasa tersebut sebagai salah satu variabel interaksi. Menurut Haugen, bahasa hanya hadir dalam pikiran penuturnya, dan hanya berfungsi ketika penuturnya dapat menghubungkan para penuturnya satu sama lain dan dapat menghubungkan bahasa dengan alam.

Dengan menggunakan memanfaatkan metafora alam Haugen (Mufwene, 2001:21) memilah ekologi bahasa berdasarkan dua sudut pandang, seperti berikut ini.

- a. Sudut pandang psikologis, yakni adanya interaksi satu bahasa dengan bahasa lain dalam pikiran penutur bilingual dan multilingual. Hal ini berkaitan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa bahasa adalah *ergon*, yaitu sebagai produk.
- b. Sudut pandang sosiologis, yakni adanya interaksi antara bahasa dengan masyarakat dimana bahasa tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi. Haugen mengaitkan ekologi sosiologis ini dengan bahasa sebagai *energia*, yaitu sebagai aktivitas berbahasa.

Kedua sudut pandang ini dapat berkontribusi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, baik dari sisi kompetensi yang sudah dimiliki dan yang akan dikembangkan dalam konteks kedwibahasaan dan keanekabahasaan. Hal ini erat kaitannya dengan beberapa fenomena hidup-matinya bahasa dalam suatu habitat yang sarat dengan persaingan bahasa. Situasi kepunahan bahasa dan ketahanan bahasa pun erat kaitannya dengan ekologi bahasa. Fenomena yang lazim terjadi dalam konteks ekologi bahasa ialah hegemoni yang menunjukkan kelas-kelas bahasa. Hal ini dikemukakan oleh Haugen, ekologi bahasa juga berkaitan persoalan mati-hidupnya suatu bahasa. Hal ini berkaitan bahwa ekologi bahasa erat kaitannya dengan politik bahasa yang dapat menekan intensitas kepunahan bahasa. Sehubungan dengan itu, pembicaraan ekologi bahasa perlu diperluas ke ranah politik untuk melahirkan konsep ekologi politik yang berpengaruh kuat terhadap fungsi, kedudukan, dan peran suatu bahasa (Sabon Ola, 2009:8). Dengan mengambil contoh bahasa Indonesia di



RDTL dan bahasa Tetun di Indonesia dan RDTL, diyakini bahwa intervensi Negara berpengaruh kuat terhadap pemertahanan, pergeseran, dan kepunahan bahasa.

2.2 Kebijakan Bahasa

Kebijakan bahasa adalah proses mempertimbangkan dan membuat putusan mengenai bahasa. Dasar pertimbangannya adalah faktor sosial, ekonomi dan politik yang mengarah pada penguatan jati diri bangsa. Penetapan kebijakan bahasa juga mempertimbangkan penerima kebijakan. Fishman (Eastman, 1983:7) mengatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan bahasa, para pembuat kebijakan perlu menyadari bahwa guyup tutur menginginkan bahasa mereka lebih rapi, teratur dan berfungsi. Kebijakan bahasa meliputi: perumusan, elaborasi (menggarap secara tekun dan cermat), kodifikasi (perumusan kaidah), dan implementasinya.

Salah satu bentuk kebijakan bahasa di Indonesia ialah perumusan kedudukan dan fungsi bahasa. Badudu (1993) mengatakan: "Dalam kebijakan nasional yang berencana, terarah dan terperinci, kita dapat mengatur fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta fungsi dan kedudukan bahasa asing". Kedudukan bahasa ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sementara fungsi bahasa ialah nilai pemakaian sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya.

Kebijakan bahasa di Indonesia memposisikan bahasa asing dalam fungsi dan perannya sebagai sarana komunikasi global. Sebagaimana slogan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: "Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing" (<https://kupang.tribunnews.com/2021>), bahasa asing perlu dikuasai, terutama bahasa Inggris, dalam kebijakan bahasa di Indonesia disebut sebagai "bahasa asing pertama".

3. BAHASAN

3.1 Bahasa Asing dalam Konteks Ekologi Bahasa

Bahasa asing menurut konteks kehidupan bahasa di Indonesia, yakni bahasa-bahasa yang ada di Indonesia minus bahasa Indonesia dan bahasa lokal/ bahasa daerah. Pengertian lain mengenai bahasa asing juga merujuk ke bahasa yang ada di negara lain yang digunakan warga negaranya, ataupun bahasa negara lain yang digunakan oleh di Indonesia. Jika demikian pengertiannya, maka yang termasuk bahasa asing di Indonesia ialah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Belanda, bahasa Italia, bahasa Jerman, dll.



Secara ekologis, bahasa asing di Indonesia merupakan bagian dari ekologi sosiologis yang bagian lainnya diisi oleh bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Ekologi ini jika dicermati dari sisi pemerolehan dan pembelajaran bahasa, maka terdapat kedekatan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Kedekatan ini memperlihatkan karakteristik ekologi psikologis. Amat jarang (mungkin juga tidak ada) pemerolehan bahasa asing berbasis pada gramatika bahasa lokal. Demikian pula kondisinya dengan pembelajaran bahasa asing.

Jika perspektif ekologis ini diperbincangkan terkait dengan ihwal pilihan bahasa, maka kecil kemungkinan/ peluang bagi pemakaian alih kode dan campur kode bahasa lokal—bahasa asing. Ekologi psikologis sebagaimana yang dikemukakan oleh Haugen tidak terwujud dalam konteks hubungan bahasa lokal dan bahasa asing di Indonesia. Dengan demikian, tidak mungkin pula muncul gejala lain, seperti interferensi dan integrasi sebagai konsekuensi dari ekologi psikologis. Implikasi lanjutan dari kondisi ini ialah kecil kemungkinan pula adanya individu yang berdwibahasa bahasa lokal—bahasa asing, misalnya: dwibahasawan Helong—Inggris, atau Rote—Jerman, atau Sabu--Belanda.

Kondisi hubungan ekologis antara bahasa lokal dan bahasa asing sebagaimana diuraikan di atas berbeda dengan hubungan ekologis antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Situasi kedwibahasaan di Indonesia secara faktual menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris berbasis pada gramatika bahasa Inggris. Mungkin saja secara tipologis bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa asing yang dipelajari di Indonesia mempunyai perbedaan yang menonjol, namun hal itu sering diabaikan karena faktor kebijakan bahasa.

3.2 Bahasa Asing dalam Konteks Kebijakan Bahasa di Indonesia

Kebijakan bahasa di Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan perlakuan terhadap bahasa asing, meskipun harus diakui bahwa porsi pengaturan lebih difokuskan pada bahasa Indonesia, di samping upaya penyelamatan bahasa-bahasa lokal yang terancam punah. Dapat disebutkan dalam makalah ini perihal regulasi yang berkaitan dengan keberadaan bahasa asing di Indonesia, antara lain: UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab VII Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik”. Frasa *dapat digunakan* menyiratkan maksud bahwa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu itu pun bahasa asing boleh tidak digunakan.



Regulasi ini sudah tentu berbeda dengan regulasi mengenai bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengisyaratkan kemauan yang sangat kuat dari Negara untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang lebih bermartabat. Usaha itu sangatlah dipahami dalam kerangka nasionalisme atau rasa kebangsaan. Pasal-pasal yang mengatur ihwal pemakaian bahasa Indonesia, yakni pasal 26—pasal 39 (sebanyak 14 pasal) diawali dengan klausa “Bahasa Indonesia wajib digunakan....”, termasuk pasal 32 ayat (1) berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia”. Hal yang hampir sama juga terlihat di dalam draft Perpres (Draft 6, Tahun 2010) tentang Penggunaan Bahasa.

Di balik regulasi mengenai bahasa Indonesia, dari perspektif fungsi komunikasi luas secara global, bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara tidak cukup representatif untuk komunikasi global dimaksud. Bahkan cita-cita untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (pasal 44) juga tidak mudah sebagaimana merumuskan kebijakan bahasa di Indonesia. Peran politik luar negeri tingkat tinggi harus diperlihatkan Negara untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia.

Kebijakan bahasa yang telah dirumuskan dalam berbagai regulasi tidak memberikan ruang yang memungkinkan bahasa-bahasa di Indonesia hidup secara lebih alamiah, meskipun kebijakan selalu bernuansa artifisial. Pasal 25 draft Perpres tentang Penggunaan bahasa telah memperlihatkan “pemaksaan” diglosia yang diperhalus dengan istilah “pengutamaan”. Dapatkan ini dikategorikan sebagai hegemoni?

3.3 Realitas Keberadaan Bahasa Asing

Jika bahasa asing, terutama bahasa Inggris dapat dianalogikan sebagai tumor ganas, maka eksepresi verbal ini tepat untuk mengatakannya: “semakin dihambat, semakin merambat”. Sudah tentu tidak ada sedikitpun niat yang terbersit di balik perumusan kebijakan bahasa di Indonesia untuk menghambat perkembangan fungsi bahasa asing. Para perumus kebijakan bahasa cenderung mendasari pekerjaannya pada pertimbangan politik; situasi yang sulit untuk dihindari. Pertimbangan yang difokuskan pad kedudukan bahasa memberikan indikasi kuat perihal kontribusi politik terhadap kebijakan bahasa.

Fungsi sosial bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing yang lebih bersifat praktis-pragmatis tidak menjadi yang utama yang melandsi perumusan



kebijakan bahasa. Kondisi ini menjadikan bahasa asing berada di posisi paradox: dari sisi kebijakan mendapatkan ruang sempit, tapi dari sisi fungsi praktis-pragmatis mendapatkan ruang sedemikian luasnya, bahkan memiliki fungsi strategis. Huda (2011:59) menulis tentang perubahan paradigm masyarakat dunia dari perjuangan berdasarkan kepentingan politik-ideologi ke perjuangan yang didasarkan pada kepentingan ekonomi. Menurutnya, persaingan antarbangsa telah melahirkan imperialisme iptek. Situasi ini pada gilirannya menimbulkan persaingan bahasa. Hubungan sebab-akibat ini tidak bisa dibalik, dan kita dapat mengatakan bahwa Negara yang tidak kuat secara ekonomi tidak terdapat peluang bagi bahasanya dipelajari/ dikuasai penggunaannya oleh Negara lain, bahkan tidak ada peluang bagi Negara bersangkutan untuk memperkenalkan bahasanya sebagai bahasa perhubungan luas. Negara semacam ini bahkan menjadi sasaran eksploitasi negara-negara maju sehingga jatidirnya pun bisa menjadi samar-samar (ingat kesadaran orang Afrika Selatan untuk memperjuangkan nasib bahasanya yang dihimpun dalam tulisan berjudul *Black Linguistic* oleh Makoni, dkk., 2003).

Kepekaan Bangsa Indonesia dalam hal jatidiri dengan pengutamaan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa lokal pada posisi berikutnya merupakan langkah antisipatif. Di balik langkah strategis ini, para pemangku kepentingan sering berjalan dengan paradigma pragmatis. Saya mencatat fakta yang unik dari balik kehadiran bahasa asing yang menurut kebijakan sangat dibatasi ranah pakainya. Para penggiat pariwisata tidak membelajarkan para wisatawan mancanegara (wisman) untuk belajar beradaptasi dengan daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Para wisman semestinya belajar bahasa Indonesia jika ia ingin berwisata ke Indonesia; mereka bahkan disambut kehadirannya di Indonesia tidak dengan bahasa Indonesia.

Tidak ada yang salah dengan fenomena ini karena sudah tentu muncul alasan pembenar bahwa hal itu dilakukan untuk menghormati tamu. Terlepas dari perilaku preskriptif itu, ada aspek deskriptif yang harus dicatat bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris **masih sangat penting, dan akan tetap penting** dalam pergaulan global. Tidak hanya tuntutan pergaulan/ komunikasi global, job-job eksekutif mensyaratkan kemampuan berbahasa asing, meskipun penguasaan pasif. Job-job kelas menengah ke bawah, misalnya sebagai sopir angkot, tukang jahit, instruktur senam, pada umumnya tidak mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris. Apa yang tersirat di balik potret iklan tenaga kerja di Indonesia memberikan penguatan akan pentingnya bahasa asing.



4. PENUTUP

Artikel ini berisi gambaran empirik yang menggelitik, di samping sejumlah rangkaian proposisi yang menantang untuk dicermati lebih lanjut. Bagian-bagian yang masih samar-samar dari makalah ini merupakan pertanda bahwa soal peran bahasa asing dalam konteks kebijakan bahasa di Indonesia harus dikelola secara dinamis. Hal-hal preskriptif harus diberi ruang bagi yang bersifat deskriptif. Jika demikian, maka peningkatan status bahasa Indonesia tidak dimaknai sebagai menyepikan peran bahasa asing. Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia tidak sebangun dengan sikap negatif terhadap bahasa asing. Membangun nasionalisme melalui kesetiaan terhadap bahasa Indonesia tidak identik dengan antibahasa asing.

Dari sisi pembelajaran bahasa, mempelajari bahasa asing sesungguhnya meningkatkan pemahaman terhadap gramatika bahasa Indonesia. Ekologi psikologis Bahasa Indonesia—Bahasa Asing memberikan ruang bagi adanya kesalingtergantungan antarbahasa. Bahasa Indonesia penting bagi penguasaan bahasa asing, sebaliknya bahasa asing penting bagi penguatan kaidah bahasa Indonesia.

Kebijakan bahasa harus adil memberikan tempat bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing secara proporsional. Rumusan kebijakan sudah tentu ada landasan berpikirnya, namun pada tataran operasionalnya mesti dipersepsikan sama: bahasa Indonesia dimantapkan kaidah-kaidahnya dan ditingkatkan kualitas penggunaannya, bahasa lokal dihidupkan kembali dan dipertahankan, dan bahasa asing harus terus dipelajari. Jangan ada hegemoni di antara “mereka” karena “kita”.



DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

- Alwi, Hasan dan Dendy Segono. 2011. *Politik Bahasa, Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badudu, J.S. 1993. *Cakrawala Bahasa Indonesia I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eastman, Carol. 1983. *Language Planning, An Intrduction*. San Fransisco: Chandler & Sharp Publisher Inc..
- Fill, Alwin and Muhlhausler, ed.2001. *'The ecolinguistics reader, language, ecology and environment'*.
- Haugen, Einar. 1972. *The Ecology of Language. Selected and Introduced by Anwar S. Dil*. Stanford: Stanford University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 1978. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mufwene, Salikoko S. 2001. *The Ecology of Language Evolution*. Cambridge University Press.
- Sugiyono dan Yeyen Maryani (Penyunting Penyelia). 2011. *Perencanaan Bahasa Abad ke-21: Kendala dan Tantangan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengem-bangan Bahasa.
- Sumarsono dan Paina Partana. 2002. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: SABDA dan Pustaka Pelajar.
- Suwito. 1983. *Pengantar Awal Sosiolinguistik, Teori dan Problema*. Surakarta: Henari Offset.
- Tauli, Vater. 1968. *Introduction A Theory of Language Planning*. Uppsala: Almqvist & Wiksells.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.